

**FUNGSI DAN KEDUDUKAN APARATUR PEMERINTAHAN
DALAM PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT
DI KECAMATAN LUBUK PAKAM KABUPATEN
DELI SERDANG**

SKRIPSI

OLEH

ARAPEN GINTING

**NPM : 08 851 0030
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

2012

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/9/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

**Judul Skripsi : FUNGSI DAN KEDUKUN APARATUR
PEMERINTAHAN DALAM PENINGKATAN
PELAYANAN MASYARAKAT DI KECAMATAN
LUBUK PAKAM KABUPATEN DELI SERDANG**

Nama Mahasiswa : Arapen Ginting
No.Stambuk : 08.851.0030
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyetujui
Komisi Pembimbing

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Drs.H. M.Yusuf Harahap

Drs.Irfan Simatupang,MSI

DEKAN,

Drs.H.Irwan Nasution,S.Pd, MAP

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/9/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)1/9/23

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	3
C. Pembatasan Masalah.....	4
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
E. Kerangka Pemikiran.....	6
F. Hipotesis.....	9
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Pengertian Pegawai	11
B. Pengertian Pelayanan.....	16
C. Pengertian Pembinaan Pegawai	17
D. Tujuan Pembinaan Pegawai	21
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN	24
A. Populasi dan Sampel	24
B. Metode Pengumpulan Data.....	24
C. Variabel dan Definisi Operasional.....	25
D. Metode Analisis Data.....	27

BAB IV. KECAMATAN LUBUK PAKAM KABUPATEN DELI SERDANG	28
A. Keadaan Alam.....	28
B. Komposisi Masyarakat.....	29
C. Struktur Organisasi Pemerintahan Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang.....	34
BAB VI. ANALISIS DAN EVALUASI	41
A. Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Oleh Aparatur Pemerintahan Kecamatan Lubuk Pakam	41
B. Pertanggung Jawaban Aparatur Pemerintahan Dalam Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat.....	44
C. Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan di Kantor Kecamatan Lubuk Pakam	48
D. Kedudukan Camat Dalam Pelaksanaan Pengawasan Pelayanan Masyarakat.....	51
E. Hambatan-Hambatan Dalam Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat.....	54
BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN	56
A. Kesimpulan	56
B. Saran.....	56

DAFTAR PUSTAKA

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/9/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)1/9/23

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Peranan Pegawai Negeri sebagai unsur Aparatur Negara dan Abdi Negara adalah sangat penting dan menentukan di dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan untuk mencapai tujuan nasional seperti tercantum dalam pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melakukan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dalam rangka untuk mencapai Tujuan Nasional sebagai tersebut di atas diperlukan adanya Pegawai Negeri yang penuh dengan kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah serta bersatu padu, bermental baik, berwibawa, berdaya guna, berhasil guna, berkedaulatan tinggi dan sadar tanggung jawab sebagai Aparat Negara dan juga Abdi Masyarakat, kiranya perlu dibina sebaik-baiknya atas dasar sistem prestasi kerja yang dibuktikan dengan nyata.

Oleh karena itu untuk mencapai kesempurnaan Aparatur yang dicita-citakan itu pada dasarnya diperoleh dari pada orang-orang atau pegawai yang bermental tinggi dan baik. Setiap manusia akan menghasilkan prestasi kerja yang lebih baik dan juga mempunyai semangat dalam menunaikan tugasnya demi tercapainya tujuan yang dikehendaki.

Sehubungan dengan itu, maka kepada setiap Pegawai Negeri perlu dilakukan pengawasan terhadap aktivitas dan perilakunya dalam melakukan penyelenggaraan tugas Pemerintahan dan Pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Pegawai Negeri merupakan unsur yang paling penting dalam suatu instansi Pemerintahan, karena pegawai inilah yang menggerakkan segala sumber daya yang ada di Pemerintahan serta yang akan mengendalikannya. Oleh karena itu Pemerintah harus memberikan perhatian yang serius terhadap para pegawai sebagaimana dengan sumber daya lainnya.

Dalam melaksanakan fungsinya, seorang atasan tidak bekerja sendirian, tetapi meminta bantuan orang lain untuk menjalankannya. Dengan demikian seorang atasan harus mampu mempengaruhi seluruh pegawai agar mau bekerja sesuai apa yang diharapkan oleh Pemerintah. Untuk itu atasan perlu mengadakan suatu sistem pengawasan kepada pegawai, sehingga mereka bekerja sebaik mungkin dan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam pelaksanaannya tindakan pengawasan terhadap kegiatan pelaku-pelaku suatu organisasi termasuk halnya kepada pegawai negeri selaku pelaku organisasi pemerintahan tidak jarang dilakukan berlebihan, sehingga tidak jarang pengawasan yang dilakukan tersebut menghambat kreativitas daripada si pegawai negeri itu sendiri. Pihak atasan terlalu menyadari bahwa mereka berada pada pihak yang harus dipatuhi sehingga terkadang terbit penekanan rasa takut pada pegawai bawahannya, sementara terkadang pegawai bawahan tidak mengerti apa yang akan dikerjakan tanpa adanya perintah dari pihak atasan. Ini merupakan problema

tersendiri dari suatu organisasi termasuk organisasi pemerintahan. Dalam kapasitas

yang di atas perlu dilakukan tindakan pengawasan. Dan dengan sebab yang demikian pula tindakan pengawasan yang dilakukan tidaklah berlebihan dan seyogianya harus dapat meningkatkan produktivitas kerja pegawainya.

Sebagai daerah penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah aparatur pemerintah yang terdapat di Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang. Dari hasil penelitian pendahuluan ditemukan suatu keadaan bahwa kedudukan aparatur belum terfungsikan secara tepat dalam hal pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat. Faktor utamanya adalah adanya rasa pamrih para aparatur dalam melayani kepentingan masyarakat dan rasa pamrih tersebut diwujudkan dengan rasa mengharapkan imbalan.

Disi lainnya keadaan yang ditemukan adalah kurangnya sarana prasarana dalam hal melakukan pelayanan kepada masyarakat, sehingga apabila instansi terendah ini melakukan pelayanan kepada masyarakat seringkali file atau data yang dibutuhkan terlebih dahulu dicari dan memakan waktu.

Dengan memperhatikan hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk menuangkannya dalam suatu karya ilmiah dengan judul skripsi : **"FUNGSI DAN KEDUDUKAN APARATUR PEMERINTAHAN DALAM PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT DI KECAMATAN LUBUK PAKAM KABUPATEN DELI SERDANG "**.

B. Perumusan Masalah

Sudah menjadi kenyataan bahwa di dalam setiap usaha akan terdapat masalah-masalah demikian pula halnya dengan Kantor Kecamatan Lubuk Pakam

Kabupaten Deli Serdang. Pengungkapan suatu permasalahan dalam pembahasan skripsi ini adalah sangat penting terutama sekali apabila dihubungkan dengan pembahasan yang akan dilakukan kelak.

Sehubungan dengan itu, untuk mengetahui lebih dalam tentang peranan aparatur pemerintahan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut :

" apakah yang menjadi kendala dan hambatan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di oleh aparatur pemerintahan Kantor Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang ".

C. Pembatasan Masalah

Masalah, sebagaimana yang dikemukakan oleh RA. Suhardi, adalah :

" Suatu persoalan atau problem yang sukar diselesaikan dan terdiri dari suatu kelompok soal-soal yang telah diketahui sebagian sedang yang sebagian lagi belum diketahui atau belum diketahui sepenuhnya, kelompok soal-soal mana menuntut supaya cepat diselesaikan " .¹

Sedangkan Winarno Surakhmad mengemukakan bahwa :

" Masalah adalah setiap kesulitan yang menggerakkan manusia untuk memecahkannya. " ²

¹ Suhardi, *Politik Sosial Modern, Dasar dan Directive*, Yayasan Karya Dharma IIP, Jakarta, 2003, hal. 1.

² Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Tarsito, Bandung, 2002, hal. 34.

Berdasarkan latar belakang masalah dan juga perumusan masalah yang telah diuraikan terdahulu, maka agar pembahasannya tidak kabur, dibutuhkan suatu pembatasan terhadap masalahnya.

Pembatasan masalah ini dimaksudkan untuk menghindari adanya uraian-uraian yang justru tidak relevan dengan masalah yang akan dibahas.

Masalah penelitian ini dibatasi pada hal-hal sebagai berikut :

1. Fungsi dan kedudukan aparatur pemerintahan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
2. Ruang lingkup lokasi penelitian yaitu Kantor Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang.
3. Pelaksanaan kerja tahun anggaran 2011.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Menurut Sutrisno Hadi tujuan penelitian adalah :

Suatu riset khususnya dalam ilmu pengetahuan empirik, pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan atau menguji suatu pengetahuan. Menemukan berarti memperluas dan menggali apa yang tidak ada, sedangkan menguji kebenarannya dilakukan jika apa yang sudah ada atau menjadi diragukan jika apa yang sudah ada atau menjadi diragukan.³

Sesuai dengan judul yang telah dipilih untuk dibahas dalam skripsi ini, maka tujuan penelitian ini adalah :

³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1997,

1. Untuk mengetahui apakah fungsi dan kedudukan aparatur pemerintahan mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di Kantor Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang.
2. Untuk mengetahui hambatan dan kendala dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kantor Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang.
3. Untuk menerapkan dan memperbandingkan teori-teori ilmu pemerintahan dalam prakteknya di lapangan.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang dilakukan adalah :

- a. Mencoba mencari kepastian dan kebenaran masalah yang diungkapkan terdahulu dan sekaligus mencari jalan untuk pemecahannya berdasarkan pengetahuan ilmiah, sehingga dapat diterapkan sesederhana mungkin.
- b. Guna memenuhi salah satu syarat dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Ilmu Pemerintahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penulisan ini didasari atas pengertian dari pada administrasi kepegawaian dan juga peningkatan pelayanan masyarakat.

Seperti telah diketahui bersama bahwa di dalam setiap organisasi sangat membutuhkan peranan manusia mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi. Untuk mendorong agar tujuan dapat terlaksana dengan baik, maka

organisasi harus dapat melakukan tindakan pengawasan sehingga kegiatan organisasi dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diharapkan.

Menurut Sondang P. Siagian :

Pengawasan berarti suatu proses pengamatan dan pengukuran suatu kegiatan operasional dan hasil yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan standard yang telah ditetapkan sebelumnya yang terlihat dalam rencana. Pengawasan dalam usaha menjamin bahwa semua kegiatan terlaksana sesuai dengan kebijaksanaan, strategi, keputusan program kerja yang dianalisa, dirumuskan dan telah ditetapkan, sebelumnya dan diselenggarakan dalam wadah yang telah disusun untuk maksud tertentu .⁴

Sedangkan administrasi diartikan sebagai " segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerja sama mencapai tujuan tertentu ".⁵

Administrasi kepegawaian adalah " segenap aktivitas yang bersangkutan paut dengan masalah penggunaan tenaga kerja yang kompeten sedemikian rupa untuk melaksanakan tujuan tertentu. Masalah pokoknya terutama berkisar pada penerimaan, pengembangan pemberian balas jasa dan pemberhentian ".⁶

Ditopang oleh keadaan-keadaan di atas maka Ilmu Administrasi tidaklah begitu saja membuat seseorang akan menjadi pemimpin yang baik, tentulah pula dilakukan upaya-upaya lain untuk meningkatkan efisiensi kerja para pegawai dalam suatu organisasi. Inilah yang mendasari kerangka pemikiran dari uraian-uraian pembahasan-pembahasan selanjutnya.

⁴ Sondang P. Siagian, *Eksekutif Yang Efektif*, PT. Gunung Agung, Jakarta, 2005, hal. 140.

⁵ Sumber Saparin, *Tata Pemerintahan Desa dan Administrasi Pemerintahan Desa*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1999, hal. 20.

⁶ The Liang Gie, I, *Administrasi Perkantoran*, Nur Cahaya, Yogyakarta, 2001, hal. 12.

Tidak dapat disangkal keadaan yang mengatakan :

Dalam kehidupan organisasi, manusia bukanlah satu-satunya asset organisasi. Sumber-sumber lain yang ada dalam organisasi seperti uang, mesin, bahan yang semakin lama semakin canggih, organisasi tersusun rapi dan prosedur kerja yang ditata secara sistematis adalah beberapa contoh dari assets tersebut .

Akan tetapi semua sumber-sumber lain itu pada dirinya tidak banyak berarti, karena sumber tersebut tidak mempunyai kemampuan insentif untuk memberikan manfaat bagi organisasi yang memilikinya tanpa diragukan dan digunakan oleh manusia.

Telah diakui pula bahwa dengan kemajuan yang pesat dewasa ini dalam dunia ilmu pengetahuan dan teknologi, berbagai teori, asas ilmiah, model dan teknik serta proses kerja telah banyak ditemukan dan dimanfaatkan. Tujuannya agar berbagai sumber daya yang dimiliki oleh organisasi dapat memberikan manfaat yang optimal . Namun betapapun besarnya kemajuan ilmiah yang diperoleh, fakta masih tetap menunjukkan bahwa usaha optimalisasi yang terus-menerus tampaknya masih tetap memberikan kemungkinan untuk lebih ditingkatkan lagi. Dengan kata lain, terlihat usaha yang sungguh-sungguh, baik di kalangan Pemerintah maupun swasta untuk mengusahakan agar kegiatan optimalisasi itu meningkat menjadi usaha maksimalisasi.

Usaha tersebut bukan hanya dapat dipahami, melainkan juga memang harus dilakukan. Minimal berdasarkan alasan bagi kepentingan organisasi pemerintahan sesuai dengan tugasnya.

Kerangka pemikiran yang diuraikan di atas memberikan pandangan kepada kita bahwa manusia adalah faktor tenaga kerja yang baik, meskipun ia berada dalam ruang waktu yang diperbantukan dengan alat-alat teknologi, tetapi tetap kondisi sentralnya dipegang oleh manusia. Maka dalam kegiatan pemerintahan dibutuhkan suatu prosedur tata kerja yang dituangkan dalam bentuk administrasi. Tetapi kondisi dari prosedur administrasi yang baik tersebut tentulah tidak akan tercapai tanpa adanya suatu umpan balik kepada hajat yang ingin dicapai oleh organisasi dimana seseorang tersebut bekerja, maka dalam hal ini peran organisasi secara langsung juga akan membentuk prosedur administrasi yang baik sehingga pelaku-pelaku administrasi itu dapat menjalankannya dengan baik, bukan memberikan kepada pelaku-pelaku administrasi tersebut bagaimana tata cara melaksanakan tugasnya terutama dalam melayani masyarakat yang berhajat pada kegiatan organisasi tersebut. Pelayanan menjadi penting karena pada dasarnya bukan kepentingan banyak pihak yang diutamakan dalam kegiatan pelayanan ini tetapi kepentingan dari negara sebagai sumber pendapatannya, sehingga dengan demikian mutu pelayanan yang diberikan harus dapat ditingkatkan melalui pelaksanaan suatu sistem administrasi.

F. Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran yang mengantarkan kemudahan dalam merumuskan hipotesis penelitian, maka penulis menyusun hipotesis yang merupakan jawaban sementara dari permasalahan yang harus di uji kebenarannya melalui suatu penelitian.

Untuk memberikan suatu pernyataan terkaan tentang hubungan tentatif antara fenomena-fenomena dalam penelitian. Kemudian hubungan tentatif ini akan di uji validitasnya menurut teknik-teknik yang sesuai untuk keperluan pengujian. Bagi seorang peneliti, hipotesis bukan merupakan suatu hak yang menjadi vested interest, dalam artian hipotesis harus selalu diterima kebenarannya itu.⁷

Berdasarkan hal-hal di atas, maka hipotesis yang diambil atas permasalahan yang telah dikemukakan adalah :

” Semakin meningkat fungsi dan kedudukan aparatur pemerintahan, maka tingkat pelayanan kepada masyarakat semakin baik ”.



⁷ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hal. 195.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pegawai

Di dalam masyarakat yang selalu berkembang, manusia senantiasa mempunyai kedudukan yang makin penting, meskipun negara Indonesia menuju kepada masyarakat yang berorientasi kerja, yang memandang kerja adalah sesuatu yang mulia, tidaklah berarti mengabaikan manusia yang melaksanakan kerja tersebut.

Demikian juga halnya dalam suatu organisasi, unsur manusia sangat menentukan sekali karena berjalan tidaknya suatu organisasi ke arah pencapaian tujuan yang ditentukan tergantung kepada kemampuan manusia untuk menggerakkan organisasi tersebut ke arah yang telah ditetapkan.

Manusia yang terlibat dalam organisasi ini disebut juga pegawai. Untuk lebih jelasnya akan dikemukakan pendapat beberapa ahli mengenai definisi pegawai.

A.W. Widjaja berpendapat " Pegawai adalah merupakan tenaga kerja manusia jasmaniah maupun rohaniah (mental dan pikiran) yang senantiasa dibutuhkan dan oleh karena itu menjadi salah satu modal pokok dalam usaha kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu (organisasi) ".⁸

Selanjutnya A.W. Widjaja mengatakan " Pegawai adalah orang-orang yang dikerjakan dalam suatu badan tertentu, baik di lembaga - lembaga pemerintah

⁸ A.W. Widjaja, *Administrasi kepegawaian*. Rajawali, 2006, hal. 13.

maupun dalam badan-badan usaha ".⁹

Dari definisi di atas dapat diketahui bahwa pegawai merupakan modal pokok dalam suatu organisasi, baik itu organisasi pemerintah maupun organisasi swasta. Dikatakan bahwa pegawai merupakan modal pokok dalam suatu organisasi karena berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya tergantung pada pegawai yang memimpin dalam melaksanakan tugas-tugas yang ada dalam organisasi tersebut.

Pegawai yang telah memberikan tenaga maupun pikirannya dalam melaksanakan tugas ataupun pekerjaan, baik itu organisasi pemerintah maupun organisasi swasta akan mendapat imbalan sebagai balas jasa atas pekerjaan yang telah dikerjakan.

Hal ini sesuai dengan pendapat Musanef yang mengatakan " pegawai adalah orang yang melakukan pekerjaan dengan mendapat imbalan jasa berupa gaji dan tunjangan dari pemerintah atau badan usaha swasta ".¹⁰

Selanjutnya Musanef memberikan definisi pegawai sebagai pekerja atau worker adalah :

" Mereka yang secara langsung digerakkan oleh seorang manajer untuk bertindak sebagai pelaksana yang akan menyelenggarakan pekerjaan sehingga menghasilkan karya - karya yang diharapkan dalam usaha pencapaian tujuan organisasi yang telah

⁹ Ibid, hal. 15

¹⁰ Musanef, *Manajemen Kepegawaian di Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta, 2004,

ditetapkan¹¹

Dari definisi di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pegawai sebagai tenaga kerja atau yang menyelenggarakan pekerjaan perlu digerakkan sehingga mereka mempunyai keterampilan dan kemampuan dalam bekerja yang pada akhirnya akan dapat menghasilkan karya – karya yang bermanfaat untuk tercapainya tujuan organisasi. Karena tanpa kemampuan dan keterampilan pegawai sebagai pelaksana pekerjaan maka alat-alat dalam organisasi tersebut akan merupakan benda mati dan waktu yang dipergunakan akan terbuang dengan percuma sehingga pekerjaan tidak efektif.

Dari beberapa definisi pegawai yang telah dikemukakan para ahli tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa istilah pegawai mengandung pengertian sebagai berikut :

1. Menjadi anggota suatu usaha kerja sama (organisasi) dengan maksud memperoleh balas jasa atau imbalan kompensasi atas jasa yang telah diberikan,
2. Pegawai di dalam sistem kerja sama yang sifatnya pamrih,
3. Berkedudukan sebagai penerima kerja dan berhadapan dengan pemberi kerja (majikan),
4. Kedudukan sebagai penerima kerja itu diperoleh setelah melakukan proses penerimaan,
5. Akan mendapat saat pemberhentian (pemutusan hubungan kerja antara pemberi kerja dengan penerima kerja).

Oleh karena yang menjadi objek penelitian penulis pada Kantor Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang adalah pegawai negeri. Ada dua pengertian pegawai negeri menurut UU Pokok Kepegawaian No. 43 Tahun 1999 :

1. Pegawai negeri adalah unsur aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat yang dengan kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, negara dan pemerintah, menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan,
2. Pegawai negeri adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam sesuatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹²

Pegawai negeri terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Karena dalam penulisan skripsi ini hanya dibatasi pada Pegawai Negeri Sipil, maka selanjutnya hanya dijelaskan mengenai perincian Pegawai Negeri Sipil.

Pegawai Negeri Sipil terdiri dari :

1. Pegawai negeri sipil pusat,
2. Pegawai negeri sipil daerah,
3. Pegawai negeri sipil lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

ad. 1. Pegawai negeri sipil pusat.

- a. Yang bekerja pada departemen, lembaga pemerintah non departemen, kesekretariatan, lembaga tertinggi/tinggi negara, instansi vertikal di daerah-daerah dan kepaniteraan pengadilan,

¹² Soewarno Handayaningrat, *Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan Nasional*, Gunung Agung, Jakarta, 2006, hal. 147.

- b. Yang bekerja pada perusahaan jawatan misalnya perusahaan jawatan kereta api, pegadaian dan lain-lain.
- c. Yang diperbantukan atau yang dipekerjakan pada Kantor Pemerintahan Propinsi Dan Kabupaten/Kota.
- d. Yang berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan dan diperbantukan atau dipekerjakan pada badan lain seperti perusahaan umum, yayasan dan lainnya,
- e. Yang menyelenggarakan tugas negara lainnya, misalnya hakim pada pengadilan negeri/pengadilan tinggi dan lain-lain.

ad. 2. Pegawai Negeri Sipil Daerah

Pegawai negeri sipil daerah diangkat dan bekerja pada Pemerintahan Daerah Otonom baik Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota.

ad. 3. Pegawai negeri sipil lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Masih dimungkinkan adanya pegawai negeri sipil lainnya yang akan ditetapkan dengan peraturan pemerintah, misalnya kepala-kepala kelurahan dan pegawai negeri di kantor sesuai dengan UU No. 43 Tahun 1999.

Dari uraian-uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa yang menyelenggarakan tugas-tugas negara atau pemerintahan adalah pegawai negeri, karena kedudukan pegawai negeri adalah sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, juga pegawai negeri merupakan tulang punggung pemerintah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan maupun dalam melaksanakan pembangunan nasional.

B. Pengertian Pelayanan

Suatu hal yang dapat dipahami tentang suatu unsur yang diberikan dalam pelayanan ini adalah memberikan apa yang dibutuhkan oleh pihak yang hendak dilayani. Kesulitan dalam memberikan pengertian tentang pelayanan ini adalah disebabkan sedikitnya yang memberikan pengertian tentang pelayanan dan bahkan tidak ada sama sekali. Tetapi meskipun demikian pengertian tentang pelayanan tetaplah ada meskipun hal tersebut ditemukan di dalam pengertian pelayanan akan sebatas kamus saja.

Sehubungan dengan hal tersebut, W.J.S. Poerwadarminta, mengatakan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia tentang pengertian dari kata pelayanan ini.

“ Pelayanan berasal dari kata layan, penambahan unsur imbuhan pe (r) memberikan arti bahwa pelayanan adalah perbuatan (cara hal yang sebagainya) melayani ; misalnya cepat dan memuaskan, layanan, perlakuan; misalnya selama ini mereka tidak mendapat yang semestinya ”¹³

Pelayanan dalam pembahasan skripsi ini adalah suatu sikap organisasi yang dalam perannya adalah bersifat melayani. Dengan perkataan lain bahwa sifat pelayanan di dalam hal ini adalah merupakan aktivitas melayani bagi kepentingan masyarakat banyak. Dalam sikap melayani perusahaan (organisasi) tersebut tidak dapat berdiri sendiri hanya sebatas dalam kegiatannya saja tetapi ia harus didukung oleh suatu konsep yang sejalan atau mendukung dari usaha pelayanan yang diberikannya. Dengan hal tersebut pelayanan disini tidak dapat berdiri sendiri, harus

¹³ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2004, hal. 573.

ditopang juga oleh sistem keorganisasian yang baik pula.

Jadi konsep pelayanan jika menguntungkan bagi suatu organisasi, atau pelayanan diberikan karena sikap atau tujuan organisasi itu adalah untuk memberikan pelayanan dan dari sini pula profit (keuntungan) bagi Bergeraknya organisasi tersebut (perusahaan). Jadi konsep melayani di dalam hal ini berbeda dengan konsep yang dianut oleh masyarakat luas terutama di dalam tujuan pekerjaan melayani tersebut. Individu atau sekelompok orang membuat pekerjaan melayani tanpa dimaksudkan untuk mencari sesuatu kepentingan atas sikap pelayanan tersebut. Tetapi berbeda dengan suatu organisasi yang bergerak untuk mencari profit, sikap melayani disini dituangkan dalam suatu konsep bahwa ada sekelompok orang (individu) yang membutuhkan pelayanan yang diberikan oleh suatu organisasi (perusahaan) dimana pelayanan yang diberikan perusahaan (organisasi) juga dimaksudkan untuk membiayai kelangsungan organisasi (perusahaan) tersebut sekaligus untuk mencari keuntungan daripadanya. Dalam hal demikian maka pemberian pelayanan dalam hal ini tidak lain seperti menjual jasa.

C. Pengertian Pembinaan Pegawai

Dalam organisasi pemerintah, yang menentukan tercapai tidaknya tujuan atau misi pemerintah adalah pegawai negeri yang menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan dalam mencapai tujuan nasional. Untuk mencapai tujuan tersebut sangat tergantung pada kesiapan pegawai negeri itu sendiri. Hal ini dapat terwujud dengan adanya kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar

1945, negara dan pemerintah disertai dengan mental yang baik, bersih, berwibawa,

berdaya guna dan sadar akan tanggung-jawabnya sebagai aparatur negara dan abdi masyarakat.

Menurut A.W. Widjaja " pembinaan pegawai adalah segala usaha untuk meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan ".¹⁴

Bertitik tolak dari definisi di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa pembinaan pegawai penting dilakukan karena untuk melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan sangat diperlukan pegawai yang berdaya guna atau pegawai yang mempunyai kemampuan yang tinggi.

Kemampuan yang harus dimiliki oleh pegawai tersebut menurut Bintoro Tjokroamidjojo adalah :

1. Kemampuan dalam menyusun pedoman dan program,
2. Kemampuan merumuskan kebijaksanaan,
3. Kemampuan dalam pelaksanaan,
4. Kemampuan untuk mengawasi dan mengendalikan.¹⁵

Dengan melihat uraian tersebut di atas maka pembinaan pegawai pada hakekatnya adalah peningkatan kemampuan pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui tugas pokok dan fungsinya dalam pelaksanaan pembangunan sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan.

Dasar-dasar kebijaksanaan pembinaan pegawai yang telah ditetapkan itu menurut Bintoro Tjokroamidjojo adalah :

¹⁴ A.W. Widjaja, *Op.Cit*, hal. 146.

¹⁵ Bintoro Tjokroamidjojo, *Manajemen Dalam Pembangunan*, Gunung Agung,

Jakarta, 1997, hal. 71.

1. Kebijakan Nasional,
Contoh : Ketetapan MPR tentang GBHN,
2. Kebijakan Umum.
Contoh : Keputusan Presiden tentang Repelita,
3. Kebijakan Pelaksanaan
Contoh : Krida kedua Kabinet Pembangunan IV
4. Kebijakan Tehnis.
Contoh : Peraturan Perundangan. ¹⁶

Dengan melihat uraian di atas maka dapat dipahami pembinaan pegawai pada hakekatnya adalah peningkatan kemampuan pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui tugas pokok dan fungsinya dalam pelaksanaan pembangunan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.

Hal ini sesuai dengan salah satu kebijakan pendayagunaan pegawai yaitu dalam GBHN antara lain disebutkan :

Aparatur pemerintah sebagai abdi negara dan abdi masyarakat makin ditingkatkan pengabdian dan kesetiannya kepada cita-cita perjuangan bangsa dan negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga mampu melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan maupun untuk menggerakkan pembangunan dengan lancar dan dilandasi semangat dan sikap pengabdian terhadap masyarakat. ¹⁷

Jadi agar aparatur pemerintah mampu melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan dapat menggerakkan pembangunan secara lancar maka perlu dilakukan usaha - usaha melalui peningkatan pendidikan dan latihan, pemberian promosi (penilaian potensi dan prestasi kerja yang objektif), mutasi, gaji dan uang pensiun yang cukup dan lain-lain.

Pembinaan yang dilakukan terhadap pegawai diarahkan untuk menjamin tugas pemerintahan dan pembangunan secara berhasil guna dan berdaya guna.

¹⁶ Ibid, hal. 17.

¹⁷ Ibid, hal. 72.

Pembinaan pegawai dengan pemberian pendidikan dan latihan, mutasi atau promosi saja masih belum cukup. Pengertian pembinaan juga mencakup pada peningkatan disiplin pegawai. Disiplin perlu diterapkan untuk menjamin tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas, menciptakan pegawai yang tidak hanya berdaya guna tetapi juga bersih, bertanggung jawab dan bermental baik. Dari pemikiran tersebut penulis mengutip pernyataan Musanef yang menerangkan bahwa :

1. Pembinaan pegawai dilandasi bahwa pegawai negeri sipil sebagai warga negara merupakan aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat yang penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, negara dan pemerintah serta bersatu padu, bermental baik, berwibawa, berdaya guna, bersih, bermutu tinggi dan sadar akan tanggung jawabnya untuk menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan.
2. Pembinaan pegawai merupakan totalitas kegiatan yang meliputi perencanaan, pengaturan dan penggunaan pegawai sehingga menjadi pegawai yang mampu mengemban tugas menurut bidangnya masing-masing agar dapat mencapai prestasi kerja yang efisien dan efektif.¹⁸

Selanjutnya asas-asas pembinaan pegawai adalah :

1. Setiap tenaga dipergunakan dan dimanfaatkan untuk kepentingan tugas (mission),
2. Penempatan orang-orang yang tepat pada jabatan-jabatan dasar pada perencanaan kepegawaian yang efektif ke arah career planning,
3. Memperbesar kemampuan dan kecakapan pegawai melalui pendidikan dan latihan yang sesuai dengan kemampuan dan perkembangan organisasi,
4. Diusahakan agar setiap orang atau pegawai berhasrat untuk mencapai prestasi kerja yang sebesar-besarnya,
5. Kesadaran nasional dipelihara dan ditingkatkan sebagai kepribadian pegawai negeri sipil sebagai anggota Korpri.¹⁹

¹⁸ Musanef, *Op.Cit*, hal. 22.

¹⁹ *Ibid*, hal. 23.

D. Tujuan Pembinaan Pegawai

Bintoro Tjokroamidjojo mengatakan tujuan pembinaan pegawai adalah : Agar aparatur negara atau pegawai baik di tingkat pusat maupun daerah, termasuk perusahaan milik negara dan daerah, sebagai aparatur perekonomian negara dapat mampu menjadi alat yang efektif, bersih dan berwibawa, sehingga mampu melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan maupun untuk menggerakkan pembangunan secara lancar dengan dilandasi semangat dan pengabdian terhadap masyarakat.²⁰

Dari pernyataan di atas, penulis menyimpulkan bahwa tujuan utama dilakukannya pembinaan pegawai adalah untuk menciptakan pegawai yang bersih dan berwibawa serta dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan selalu efektif dan efisien.

Pegawai atau aparatur negara yang bersih dan berwibawa maksudnya adalah pegawai yang seluruh tindak tanduknya dapat dipertanggung-jawabkan, baik dilihat dari segi peraturan perundang-undangan maupun moral atau nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.

Sedangkan efektif dan efisien dalam hal ini maksudnya adalah bahwa pegawai dapat menyelesaikan pekerjaannya tepat pada waktu dan rencana yang telah ditentukan, juga dalam menyelesaikan segala sesuatu dengan tepat, cepat, hemat dan selamat.

²⁰ Bintoro Tjokroamidjojo, *Op.Cit*, hal. 113.

Tujuan pembinaan adalah :

1. Membentuk sikap aparatur negara agar berorientasi kepada pembangunan sehingga mampu bertindak sebagai pemrakarsa pembaharuan dan sebagai penggerak pembangunan,
2. Untuk mewujudkan aparatur negara agar mempunyai sikap mental yang tidak memboroskan sumber daya pembangunan dan dapat meningkatkan kemampuan pendapatan negara serta menyasikan antara pembangunan sektoral dan regional dalam kesatuan politik, ekonomi dan HANKAM,
3. Untuk menggerakkan partisipasi rakyat dalam mendukung pelaksanaan program pemerintah serta menumbuhkan rasa memiliki dan memelihara hasil-hasil pembangunan,
4. Menjadikan aparatur negara memiliki kemampuan profesional, produktif, kreatif, inovatif serta tanggap dan peka terhadap aspirasi masyarakat di samping memiliki orientasi kemas depan dan kesediaan menjadi pelopor dalam pembangunan.
5. Agar dalam diri aparatur negara timbul upaya untuk selalu memperbaiki diri dengan cara mengorganisasi kegiatannya dalam berbagai tugas dan fungsinya sesuai dengan tuntutan pembangunan.

Dari uraian di atas penulis menyimpulkan bahwa pembinaan pegawai harus secara terus-menerus dilakukan sesuai dengan peningkatan pelaksanaan pembangunan nasional karena aparatur negara sebagai pemrakarsa pembaharuan dan penggerak pembangunan. Di samping itu dengan adanya pembinaan, pegawai akan memiliki sikap mental yang baik dalam arti tidak memboroskan sumber daya

pembangunan dan dapat meningkatkan pendapatan negara, memiliki kemampuan profesional, produktif, inovatif dan dapat menjadi pelopor dalam pembangunan.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Populasi dan Sampel

Secara lebih formal, pengambilan sampel terdiri atas pilihan elemen dari populasi. Populasi dapat berupa kumpulan dari setiap objek penelitian. Pada dasarnya, populasi adalah himpunan semua hal (keseluruhan realita sosial) yang ingin diketahui.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai di Kantor Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang yang berjumlah 8 orang.

Sedangkan sampel, dikatakan oleh Sudjana :

“ Adapun bagian yang diambil dari populasi disebut sampel. Sampel-sampel itu harus representatif dalam arti segala karekteristik populasi hendaknya tercermin dalam sampel yang dimiliki. Kekeliruan penarikan dapat terjadi karena kurang cermat memahami populasi.²⁷

Yang menjadi sampel dalam penelitian ini seluruh populasi yaitu sejumlah 8 orang.

B. Metode Pengumpulan Data

Di dalam melaksanakan pengumpulan data maupun keterangan yang diperlukan dalam penelitian ini penulis memakai cara :

²¹ Sudjana, *Statistika*, Tarsito, Bandung, 2006, hal. 167.

1. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Penelitian kepustakaan ini dimaksudkan sebagai usaha mempelajari buku-buku, majalah ilmiah, bahan perkuliahan dan literatur atau bahan lainnya yang dianggap relevan dengan masalah yang diteliti.

2. Penelitian Lapangan (Field Research).

Dalam penelitian lapangan ini guna memperoleh data atau informasi dimana penulis langsung terjun ke lapangan dengan pokok permasalahan, dengan jalan mengadakan :

a. Observasi, yaitu studi yang sengaja dan sistematis dengan jalan mengadakan pengamatan. Bentuk observasi adalah non-partisipasi, yaitu penulis tidak ikut serta berpartisipasi di dalam kegiatan pemerintahan atau kantor tempat penelitian, melainkan hanya mengamati objek penelitian tersebut.

b. Interview (wawancara).

Yaitu dilakukan terhadap para pejabat yang berwenang untuk memberikan informasi, terutama dengan kepala-kepala bagian di lokasi penelitian skripsi ini.

C. Variabel dan Definisi Operasional

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengemukakan dua variabel yang sangat menentukan dan saling berhubungan.

Kedua variabel tersebut adalah sebagai berikut :

1. Variabel bebas (Independent Variable) atau disebut juga dengan variabel yang diselidiki pengaruhnya.

Adapun variabel bebas dalam penelitian ini " Fungsi dan Kedudukan Aparatur pemerintahan ", dengan indikatornya :

- a. Disiplin Kerja.
- b. Kondisi kerja.
- c. Fasilitas kerja.

2. Variabel terikat (Independent Variable) atau disebut juga dengan variabel ramalan, yakni variabel yang diramalkan akan timbul sebagai akibat pengaruh variabel bebas. Adapun variabel terikat dalam penelitian ini adalah " peningkatan pelayanan , dengan indikatornya :

- a. Administrasi kependudukan.
- b. Sosial kemasyarakatan
- c. Pembinaan kemasyarakatan

Variabel-variabel di atas akan dijelaskan dalam bentuk definisi operasional sebagai berikut :

1. Variabel bebas " Fungsi dan Kedudukan Aparatur Pemerintahan " dengan indikatornya :

- a. Disiplin kerja.

Adalah peraturan –peraturan baik yang dibuat oleh atasan organisasi maupun juga oleh pemerintah dalam hal pelaksanaan kerja pegawai.

- b. Kondisi kerja.

Adalah merupakan keadaan dimana pekerjaan itu akan dilakukan baik itu kebersihannya dan juga keberadaan lokasi kerja dari si pegawai tersebut.

c. Fasilitas kerja.

Adalah sarana-sarana pendukung dilakukannya pekerjaan oleh si pegawai.

2. Variabel terikat " pelayanan " dengan indikatornya :

a. Administrasi kependudukan.

Adalah bentuk pelayanan dalam bentuk surat-surat keterangan, seperti KTP, dan lain sebagainya.

b. Sosial kemasyarakatan

Turut serta dalam aktivitas dan kegiatan masyarakat dalam bidang sosial.

c. Pembinaan kemasyarakatan

Sebagai wadah bagi masyarakat untuk dalam melakukan hubungan-hubungan yang bersifat ketatanegaraan.

D. Metode Analisis Data

Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif.

Metode ini merupakan pemaparan dari hasil pengumpulan data sehingga pada akhirnya dapat diberikan kesimpulan dan saran.



BAB IV

KECAMATAN LUBUK PAKAM KABUPATEN DELI SERDANG

A. Keadaan Alam

Alam lingkungan erat hubungannya dengan keadaan wilayah dari suatu tempat atau daerah. Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat, yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.

Keadaan monografi wilayah Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang adalah sebagai berikut :

1. Letak wilayah

Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang adalah salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Deli Serdang.

Adapun batas wilayah Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang adalah:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Morawa
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Lubuk Pakam
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Serdang Bedagai
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Morawa

Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang berada antara 0 sampai dengan 50 m dari permukaan laut, dengan curah hujan rata-rata 0,3 mm.

Sedangkan keadaan suhu berkisar 23,4⁰C

Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang mempunyai luas wilayah sekitar +/- 50 ha, yang terdiri dari beberapa kelurahan/desa. Tanah yang tersedia digunakan untuk pemukiman dan perumahan penduduk.

2. Potensi Alam

Potensi Alam Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang adalah sebagaimana umumnya kecamatan-kecamatan yang terdapat di daerah pinggiran perkotaan yaitu kebanyakan ditunjang oleh sektor perindustrian dan juga ditopang oleh sektor-sektor swasta. Jadi disini dapat dikatakan bahwa potensi alam tidaklah mendukung sekali dalam perkembangan dan kemajuan dari Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang.

B. Komposisi Masyarakat

Anggota masyarakat di Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang hidup secara bersama-sama dalam suatu wilayah atau tempat tinggal tetap yang bersifat majemuk, dimana terdapat berbagai suku bangsa, agama, atau kepercayaan. Untuk mengetahui tentang komposisi masyarakat di Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, penulis menguraikan sebagai berikut :

1. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk di Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang adalah 8846 jiwa dengan jumlah rata-rata kepadatan sebesar 150 per km. Jumlah penduduk dapat dibagi menurut jenis kelamin dan umur.

Adapun jumlah penduduk menurut jenis kelamin adalah sebagai berikut :

Tabel 1

**Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin
Di Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang Tahun 2011**

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Laki-laki	4107 jiwa
2.	Perempuan	4749 jiwa
3.	Jumlah seluruhnya	8846 jiwa
4.	Kepadatan penduduk	150 per km

Sumber : Kantor Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang

Tabel 2

**Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Umur
Di Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang Tahun 2011**

No.	Golongan Umur	Jumlah
1.	0 – 12 bulan	406
2.	13 bulan – 4 tahun	434
3.	5 – 6 tahun	516
4.	7 – 12 tahun	908
5.	13 – 15 tahun	959
6.	16 – 18 tahun	1168
7.	19 – 25 tahun	1109
8.	26 – 35 tahun	976
9.	36 – 45 tahun	942
10.	46 – 50 tahun	776
11.	51 – 60 tahun	256
12.	61 – 75 tahun	224
13.	lebih dari 76 tahun	172
Jumlah		9691 jiwa

Sumber : Kantor Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang

2. Mata Pencaharian

Bila dilihat dari segi mata pencaharian, penduduk di Kecamatan Lubuk Pakam

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/9/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)1/9/23

Kabupaten Deli Serdang dapat penulis kemukakan bahwa sebagian besar penduduk adalah berdagang di samping mata pencaharian lainnya seperti pengrajin, karyawan, pegawai negeri dan TNI. Tentang uraian jenis pekerjaan tidak didapatkan datanya di Kantor Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang tetapi perihal mata pencaharian penduduk dibagi ke dalam angkatan. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3
Angkatan Kerja dan Pengangguran
Di Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang Tahun 2011

No.	Mata Pencaharian	Jumlah / jiwa
1.	Angkatan kerja	2250
2.	Yang sudah bekerja	1800
3.	Yang belum bekerja	450

Sumber : Kantor Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang

3. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu faktor sosial yang penting dari kemajuan suatu bangsa. Faktor pendidikan yang pesat dan meningkat pada masyarakat menjadi ukuran bagi negara maju dan berkembang, karena semakin tinggi pendidikan masyarakat, maka semakin tinggi pula perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan kebudayaan bangsa itu.

Jadi pendidikan merupakan suatu alat dan sarana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan adanya pendidikan masyarakat tidak bodoh lagi dan

dapat menggunakan hasil dari pendidikan itu untuk kesejahteraan kehidupannya.

Menurut penulis, tingkat pendidikan dan sarana pendidikan di Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang cukup memadai dalam menunjang pembangunan bangsa.

Dari hasil penelitian di Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang data pendidikan tidak terdapat, sehingga dalam menguraikan perihal pendidikan hanya diteliti ada tidaknya sarana pendidikan di Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang.

Adapun sarana dan prasarana pendidikan di Kelurahan Sei Putih Tengah adalah sebagai berikut :

Tabel 4

Sarana Pendidikan di Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang Tahun 2011

No.	Tingkat Pendidikan	Keterangan
1.	TK	Ada
2.	SD	Ada
3.	SLTP	Ada
4.	SLTA	Ada
5.	Perguruan Tinggi/Akademi	-

Sumber : Kantor Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang

4. Agama

Kerukunan hidup beragama di Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli

Serdang berjalan dengan baik. Satu sama lain saling hormat menghormati dan harga

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/9/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)1/9/23

menghargai dalam melaksanakan kegiatan ibadah agama dan dapat hidup berdampingan secara layak dengan rasa kekeluargaan di dalam pergaulan hidup sehari-hari.

Masyarakat di Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang benar-benar telah memahami dan mengamalkan butir-butir Pancasila dari sila pertama yakni Ketuhanan Yang Maha Esa, ini terlihat dari adanya kebebasan dalam beribadah dan saling menghormati antar agama.

Penduduk Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang Antar penganut Kristen protestan dan Islam lebih besar Kristen Protestan. Hal ini dapat kita lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 5

Jumlah Pemeluk Agama Dan Rumah Ibadah
Di Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang Tahun 2011

No.	Agama	Pemeluk	Rumah Ibadah
1.	Islam	3459	Gereja 5 buah Mesjid 4 buah
2.	Protestan	4748	
3.	Katholik	405	
4.	Budha	62	
5.	Hindu	22	

Sumber : Kantor Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang

5. Kesehatan

Dari penelitian penulis masalah kesehatan di Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang cukup baik. Penduduk sudah mengerti akan pentingnya hidup sehat. Sarana kesehatan di kecamatan ini juga cukup memadai. Ini dapat

dilihat dengan adanya BKIA (Balai Kesehatan Ibu dan Anak) dan adanya beberapa

praktek dokter.

C. Struktur Organisasi Pemerintahan Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang

Bahwa sebagaimana diketahui bahwa camat mempunyai kedudukan sebagai Kepala Wilayah yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Oleh karenanya camat sebagai penguasa tunggal di bidang Pemerintahan dan sekaligus sebagai pejabat tertinggi di wilayah Kecamatan yang lepas dari persoalan pangkat, yang bertanggung-jawab dan berkewajiban untuk memimpin dan menyelenggarakan pemerintahan serta membina kehidupan masyarakat dalam segala bidang.

Adapun pola pembagian tugas di Kantor camat Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang adalah sebagai berikut :

1. Camat adalah sebagai administrator pemerintahan, administrator pembangunan, dan kemasyarakatan yang meliputi tugas-tugas sebagai berikut :
 - a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang.
 - b. Menyelenggarakan pemerintahan umum dan urusan pemerintahan lokal Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan yang diberikan oleh Bupati Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang.
 - c. Memegang kebijaksanaan politik dalam rangka usaha memelihara keamanan,

ketertiban, di wilayahnya.

- d. Mengadakan kerjasama dengan unsur TNI/Polri yang bertugas di wilayah Kecamatan Lubuk Pakam untuk memperlancar tugas-tugas pemerintahan.
 - e. Melaksanakan tugas dibidang sipil lainnya di wilayah Kecamatan Lubuk Pakam.
 - f. Melaksanakan tugas sebagai prajaksa.
 - g. Memberikan saran-saran, pertimbangan kepada Bupati Kabupaten Deli Serdang tentang langkah-langkah yang akan ditempuh.
2. Sekretriats Wilayah Kecamatan mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :
- a. Membantu camat Lubuk Pakam dalam bidang tugasnya.
 - b. Memimpin dan menyelenggarakan administrasi kantor camat Lubuk Pakam.
 - c. Mempersiapkan segala sesuatu tugas camat Lubuk Pakam.
 - d. Membuat laporan keamanan dan ketertiban wilayah Kecamatan Lubuk Pakam sesuai dengan petunjuk camat.
3. Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Lubuk Pakam mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :
- a. Melaksanakan tugas-tugas dibidang ke-prajaksanaan sesuai dengan petunjuk camat.
 - b. Melaksanakan tugas atau usaha-usaha kegiatan untuk mengamankan pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan lainnya sesuai dengan petunjuk camat.
 - c. Mengumpulkan dan menyusun data-data dibidang keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatannya.

4. Urusan pembangunan yang meliputi tugas-tugas sebagai berikut :

- a. Membantu sekretaris Wilayah Kecamatan dalam bidang tugasnya.
 - b. Mengumpulkan, mensistematisasikan dan menganalisa data pembangunan desa/kelurahan dan pembangunan pada umumnya.
 - c. Melaksanakan diklat bagi masyarakat serta melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka pembinaan dan pengembangan kependudukan.
 - d. Menyusun dan memberikan petunjuk penyusunan program dalam rangka koordinasi perencanaan program pembangunan sistem unit daerah kerja pembangunan di Wilayah Kecamatan Lubuk Pakam.
 - e. Melakukan pembinaan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan menyelenggarakan lomba desa.
 - f. Melakukan pembinaan pembangunan prasarana desa dan pengembangan perekonomian desa.
 - g. Melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka pelaksanaan pemukiman kembali, pemugaran lingkungan di wilayah Kecamatan Lubuk Pakam.
 - h. Melakukan membina administrasi pelaksanaan bantuan pembangunan pemerintah pusat kepada Kepala Desa dan bantuan pembangunan yang berasal dari Tingkat I dan II.
 - i. Melakukan pembangunan koordinasi dalam rangka mensukseskan program Bimas, Insus, Penghijauan dan sebagainya.
5. Urusan Kemasyarakatan mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :
- a. Membantu sekretaris wilayah Kecamatan dalam bidang tugasnya.

b. Mengumpulkan, mensistematisasikan dan menganalisa data untuk pembinaan

- kesejahteraan rakyat.
- c. Mempersiapkan bahan-bahan pembinaan terhadap penderita cacad, tuna karya, panti asuhan dan lain-lain.
 - d. Mempersiapkan penyusunan program pembinaan kesejahteraan rakyat.
 - e. Mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan keolahragaan, generasi muda, kebersihan, keluarga berencana, peningkatan mutu gizi, pemberantasan penyakit menular, kepramukaan dan lain-lain.
 - f. Memeberikan petunjuk-petunjuk untuk meningkatkan usaha-usaha sosial kemasyarakatan.
 - g. Menjalankan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat maupun Sekretaris Wilayah Kecamatan.
6. Urusan administrsi mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Membantu Sekretaris Wilayah Kecamatan dalam bidang tugasnya
 - b. Melakukan urusan surat menyurat
 - c. Menyimpan dan memelihara arsip-arsip surat
 - d. Melakukan pengetikan, penggandaan surat-surat dan naskah dinas lainnya yang diperlukan .
 - e. Mengurus Pembukuan Keuangan.
 - f. Mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka mutasi pegawai (pengangkatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji dan lain-lain).
 - g. Mengurus pertanggung jawaban atas penggunaan keuangan ynag telah digunakan/dikeluarkan.
 - h. Mengurus dan membayar gaji pegawai.

- i. Merencanakan, mengadakan, memelihara alat-alat perlengkapan kantor.
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat maupun Sekretaris Wilayah Kecamatan.

Melihat dari struktur organisasi atau pola pembagian tugas/kerja Pemerintah Wilayah Kecamatan Lubuk Pakam ada dua (2) jabatan yang langsung bertanggung jawab kepada camat Lubuk Pakam yaitu Sekretaris Wilayah Kecamatan dan satuan Polisi Pamong Praja, di samping Jabatan Kepala Desa/Kelurahan yaitu Pemerintah yang berjenjang vertikal/hirarkhis dari bawah ke atas.

Di bawah Satuan Polisi Pamong Praja adalah pegawai atau staf Pamong praja, sedangkan di bawah Sekretaris wilayah Kecamatan ada empat (4) Kepala Urusan yaitu :

1. Kepala Urusan Pemerintahan
2. Administrasi
3. Kemasyarakatan
4. Pembangunan

Yang selanjutnya dibawah Kepala Urusan adalah para Pegawai/staf Urusan yang bersangkutan.

Selain dua (2) jabatan yang berada dibawah camat Lubuk Pakam tersebut ada lagi jabatan yang disebut Unsur aparat Departemen dalam Negeri yaitu Ka. Wamil hansip ini adalah bersifat komando artinya camat Lubuk Pakam dapat membina dan mengawasi pelaksanaan tugas camat selaku Kepala Wilayah.

Di samping itu masih ada lagi jabatan instansi otonom yang ada di Kecamatan Lubuk

Pakam seperti :

- a. Unit pelaksanaan Teknis Dearah Dinas Pendapatan (UPTDDP).
- b. Seksi Dinas P dan K Kecamatan Lubuk Pakam
- c. Urusan Seksi Kebersihan kecamatan Lubuk Pakam
- d. Polisi Kehutanan
- e. Menteri Perkebunan

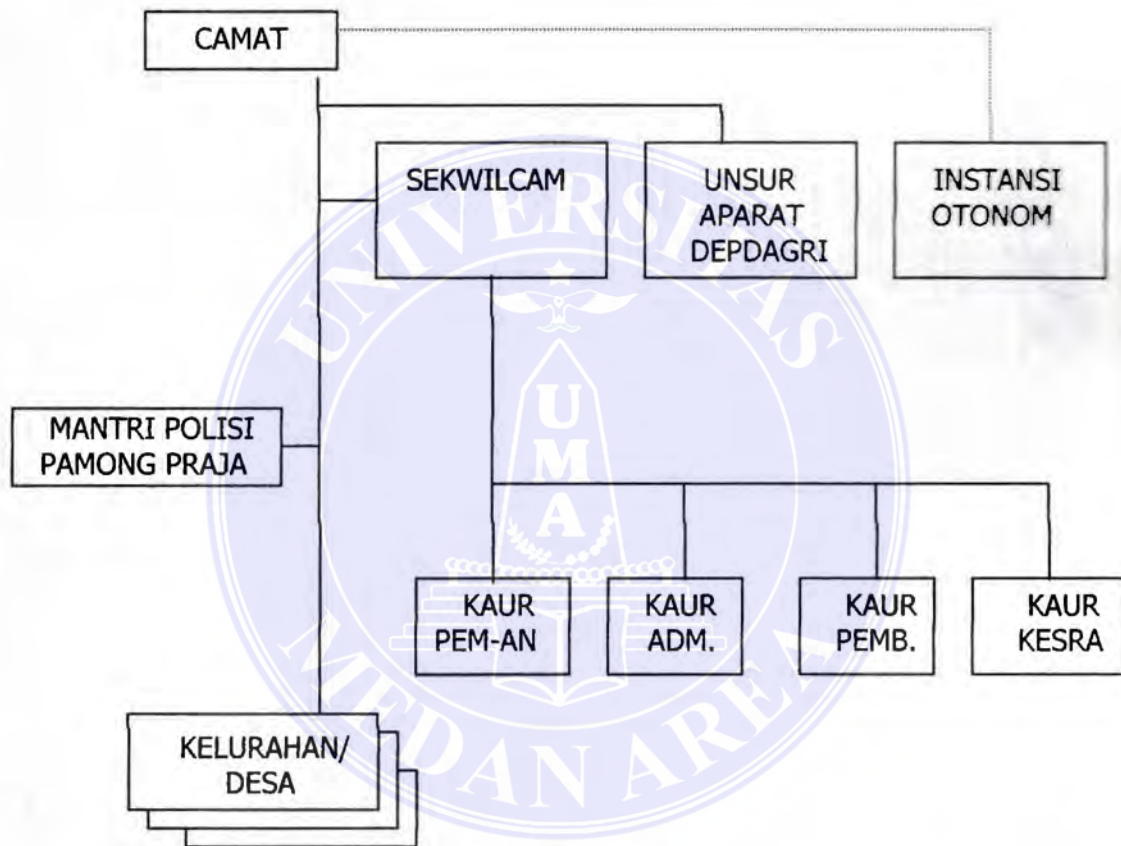
Sedangkan instansi-instansi vertikal di Kecamatan Lubuk Pakam adalah :

- a. Koramil.
- b. Polsekta Lubuk Pakam
- c. Ka. PPLKB Kecamatan Lubuk Pakam
- d. Juru Penerangan (JUPEN)
- e. Kantor Urusan agama (KUa) Kecamatan Lubuk Pakam.
- f. Kantor Pos dan Giro Kecamatan Lubuk Pakam.
- g. Dan lain-lain.

Demikianlah Struktur/susunan organisasi pola pembagian tugas/kerja pada Kantor camat Kecamatan Lubuk Pakam yang secara terperinci dan telah nyata adanya pembagian tugas yang jelas diantara terikat serta saling mendukung untuk mewujudkan tujuan pembangunan.

Berikut ini untuk melengkapi uraian di atas akan digambarkan struktur organisasi dari Kantor Kecamatan Lubuk Pakam.

Gambar 1
 Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Lubuk Pakam
 Kabupaten Deli Serdang



----- = Garis Koordinasi

————— = Garis Komando

Sumber : Kantor camat Lubuk Pakam

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

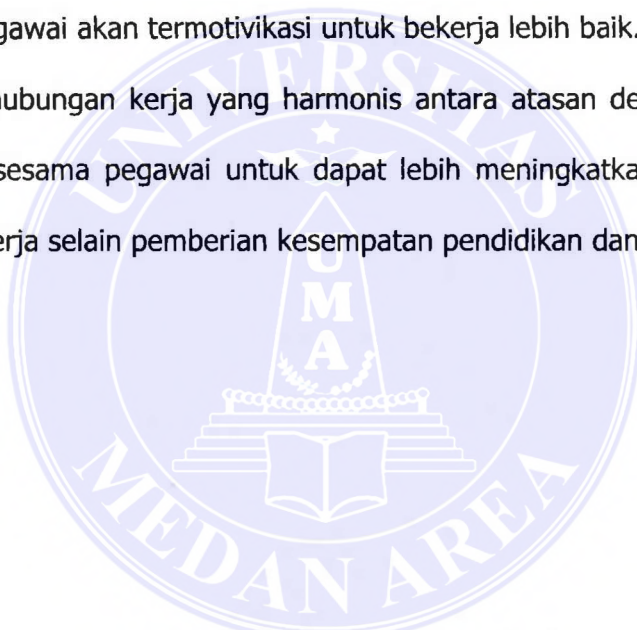
1. Pelaksanaan fungsi pemerintah dalam hal pelayanan kepada masyarakat belum berjalan secara baik, disebabkan aparatur pemerintahan masih menganggap bahwa kedudukan mereka lebih tinggi dari masyarakat, sehingga dalam sistem pelayanan yang diberikan sering kali adanya sikap pamrih serta mengharapkan imbalan.
2. Efektivitas pelayanan kepada masyarakat luas sangat ditentukan kebijaksanaan pimpinan di lingkungan instansi pemerintahan tersebut, karena pegawai bawahan dalam menentukan sikap pelayanan bersifat apatis dan menunggu petunjuk dari atasan.
3. Pembinaan karier pegawai (sumber daya manusia) dilakukan dengan mengadakan pendidikan dan latihan, disiplin, mutasi, promosi maupun pemberian penghargaan dimana bidang-bidang tersebut harus dapat diterapkan secara tepat dengan waktu yang semaksimal mungkin dan dilakukan secara menyeluruh.

B. Saran

1. Hendaknya dalam melaksanakan pemberdayaan pegawai di lingkungan Kantor Kecamatan Lubuk Pakam dapat mencakup keseluruhan pegawai. Hal ini perlu dilakukan untuk mengurangi kesenjangan keterampilan, disiplin,

efektivitas kerja dari para pegawai. Ini terbukti dari hasil penelitian penulis di lapangan bahwa tidak keseluruhan pegawai mendapat pendidikan atau latihan. Sementara ada pegawai yang mendapat pendidikan dan latihan lebih dari satu kali.

2. Agar penilaian dan evaluasi terhadap pegawai dilakukan secara rutin, lengkap dan objektif sesuai dengan prosedur penilaian sehingga dengan demikian pegawai akan termotivikasi untuk bekerja lebih baik.
3. Diperlukan hubungan kerja yang harmonis antara atasan dengan bawahan dan antara sesama pegawai untuk dapat lebih meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja selain pemberian kesempatan pendidikan dan latihan.



DAFTAR PUSTAKA

- A.W. Widjaja, *Administrasi kepegawaian*. Rajawali, 2006.
- Arifin Abdurrachman, *Persoalan manusia Dalam Manajemen*, Majalah Administrasi Negara, LAN, Jakarta, Tanpa Tahun.
- Bintoro Tjokroamidjojo, *Manajemen Dalam Pembangunan*, Gunung Agung, Jakarta, 1997.
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998.
- Musanef, *Manajemen Kepegawaian di Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta, 2004.
- Soewarno Handayaniingrat, *Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan Nasional*, Gunung Agung, Jakarta, 2006.
- Sondang P. Siagian, *Eksekutif Yang Efektif*, PT. Gunung Agung, Jakarta, 2005.
- Sudjana, *Statistika*, Tarsito, Bandung, 2006.
- Suhardi, *Politik Sosial Modern, Dasar dan Directive*, Yayasan Karya Dharma IIP, Jakarta, 2003.
- Sumber Saporin, *Tata Pemerintahan Desa dan Administrasi Pemerintahan Desa*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1999.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1997.
- The Liang Gie, *Administrasi Perkantoran*, Nur Cahaya, Yogyakarta, 2001.
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2004.
- Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Tarsito, Bandung, 2002.